

# “Merajut Kekuatan Lokal, Menuju Kemandirian”

oleh: Nurhasniati & Johnly E.P. Poerba



Ibu-ibu antusias mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSU Tani Nelayan Palabusa, Januari 2008. Pada rapat ini pengurus dan anggota mendiskusikan pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) atau keuntungan

*“Saya seorang janda yang bekerja sebagai buruh perusahaan mutiara. Dulu saya merasa tidak terlalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan LED, karena sejak awal sepertinya sudah diarahkan ke petani rumput laut saja. Namun, setelah terbentuknya KSU Tani Nelayan di Palabusa ini, maka saya optimis bahwa manfaatnya tidak lagi tertuju kepada petani rumput laut saja. Kenyataannya, memang, semua lapisan masyarakat sekarang dapat mengajukan permintaan untuk dibantu dalam aspek permodalan. Pinjaman modal dari koperasi ini telah saya manfaatkan untuk merintis usaha penjualan kue di kampung, sembari saya tetap bekerja di perusahaan mutiara mabe.” (Ibu Hamid, 50 tahun, buruh perusahaan mutiara)*

*“Dulu pekerjaanku sebagai pembom ikan, dan aku dapat menyelam ke dasar laut. Saat program pengembangan budidaya rumput laut mulai berkembang di sini, masyarakat sering meminta jasa saya untuk menyelam dan mengikatkan labu (jangkar) rakit rumput laut ke dasar laut. Lama kelamaan saya tertarik dengan budidaya rumput laut, dan mulai dipercaya pengurus LED untuk masuk menjadi anggota kelompok. Akhirnya, kini saya beralih pekerjaan menjadi petani rumput laut dan meninggalkan pekerjaan lama membom ikan. Di samping beresiko terhadap keselamatan diri saya, membom ikan juga merusak terumbu karang.” (Mukmin, 56 tahun, Kelompok siontapina)*

Pada masa Orde Baru yang lalu, koperasi identik dengan “KUD”. Bukan “Koperasi Unit Desa,” melainkan “Ketua Untung Duluan.” Plesetan ini muncul karena buruknya pengelolaan koperasi—tidak peduli apakah itu KUD, yang muncul karena insentif negara, atau bentuk dan jenis koperasi lain, yang lahir lantaran inisiatif anggota-anggotanya. “Ketua Untung Duluan” terjadi di mana-mana sebagai akibat kealpaan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang demokratis: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan sosial, dan penegakan hukum.

Demikian juga yang terjadi di Kelurahan Palabusa, Kota Bau-Bau. Sebagai kelanjutan dari kerjasama antara masyarakat dan Yayasan PRIMA pada satu pihak, dan ACCESS-AusAID pada pihak lain, maka masyarakat Kelurahan Palabusa kemudian mendirikan sebuah lembaga ekonomi desa (LED). Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat, terutama kaum miskin dan perempuan, mengakses sumber daya permodalan dari kalangan mereka sendiri. (Seperti diketahui, masyarakat marjinal biasanya



Seorang Pak Tua Anggota KSU Tani Nelayan Palabusa Sedang memamerkan hasil Rumput Lautnya

tidak mampu memenuhi persyaratan yang dikemukakan lembaga-lembaga penyediaan modal, seperti bank, koperasi, dan lain sebagainya, tatkala mereka hendak mengajukan pinjaman.) Di samping itu, pembentukan LED ini—oleh warga—juga ditujukan guna menyediakan wadah untuk meneruskan pembelajaran prinsip-prinsip partisipatoris, termasuk keberlanjutan lingkungan, yang telah dikembangkan oleh penduduk lewat penerapan metodologi CLAPP-GPI (*Community-Led Assessment and Planning Process—Gender and Poverty Inclusion*). (Bandingkan kedua tujuan tersebut dengan 2 kutipan di awal tulisan.) Sayangnya, perilaku ketua yang

ingin untung duluan menyebabkan lembaga ekonomi tersebut sempat menuju ambang kehancuran. Salah urus, minimnya transparansi sang ketua, dan rendahnya keterlibatan pengurus lain dan anggota-anggota, membuat perjalanan LED tersendat-sendat, dan dikhawatirkan tidak akan pernah mencapai tujuannya.

Beruntunglah, dalam suasana yang memprihatinkan tersebut, masih ada semangat yang terus menyala pada beberapa anggota LED. Didorong oleh keinginan yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Palabusa, yang mayoritas adalah petani dan nelayan, Pak Amin bersama-sama dengan beberapa anggota LED memotori pendirian lembaga ekonomi yang “baru”, yang sekarang berbentuk koperasi. Mereka menamakannya Koperasi Serba Usaha (KSU) Tani Nelayan Palabusa. Pembentukan koperasi itu juga didukung Yayasan PRIMA, yang mengharapkan koperasi ini tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, yaitu abai terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang demokratis.



Rumput Laut di jemur di atas "para-para (jemuran bambu)

Modal awalnya diperoleh dari sisa dana LED yang masih bisa diselamatkan, yakni sebesar Rp 35.662.000,00, dan anggotanya berjumlah 16 orang. Jadi, KSU ini bisa dikatakan hasil metamorfosis dari LED terdahulu.

Pada awal berdirinya KSU ini, tantangan yang dirasakan paling berat adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada koperasi. Dengan pendampingan dari PRIMA, secara perlahan pengurus koperasi membenahi diri. Pengurus didorong untuk memahami bagaimana berkelompok dan mengelola koperasi secara baik. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas (pertanggungjawaban), serta pelibatan anggota dalam berbagai aspek pengelolaan koperasi, selalu didorong untuk diterapkan. Melalui mekanisme RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang dijalankan secara teratur, anggota koperasi diajak turut serta memikirkan pengembangan koperasi secara bersama-sama. Di luar mekanisme RAT, pengurus dan anggota pun sering mengadakan pertemuan bila mereka mempunyai isu tertentu yang membutuhkan pembahasan bersama. Proses ini telah berhasil meningkatkan kepercayaan anggota serta membuat mereka merasa memiliki koperasi tersebut. Saat ini kerja keras selama dua tahun berdirinya koperasi mulai menampakkan benih-benih keberhasilan. Kepercayaan masyarakat secara perlahan kembali tumbuh. Anggota koperasi yang

pada awalnya hanya 16 orang kini telah meningkat menjadi 57 orang, yang terdiri 29 orang laki-laki dan 28 orang perempuan. Seiring dengan itu, modal koperasi pun mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Jumlahnya kini mencapai Rp. 82.107.797,00.

Dengan besaran modal tersebut, koperasi mampu mendukung pengembangan beberapa jenis usaha anggotanya seperti budidaya rumput laut, dan jual beli sembako (sembilan bahan pokok). Koperasi pun memberikan pinjaman kepada anggotanya yang memerlukan biaya pendidikan anak. Tidak hanya itu, koperasi juga mulai melakukan perluasan usaha seperti melayani pembayaran listrik bagi anggota-anggotanya dan penduduk sekitar. Akhirnya, KSU Tani Nelayan Palabusa sedang mencoba meningkatkan "posisi tawar" anggota-anggotanya di hadapan pedagang pengumpul rumput laut. Caranya adalah dengan menganjurkan anggota-anggotanya untuk melakukan penjualan rumput laut secara serempak. Dengan cara ini, pengurus dan anggota koperasi mengharapkan harga jual produksi pertanian mereka selalu berada dalam angka yang menguntungkan mereka. Kini, walau KSU Tani Nelayan Palabusa telah mencapai cukup banyak kemajuan, pengurus dan anggotanya masih merasa belum puas. Masih ada tantangan yang membutuhkan kerja keras untuk mengatasinya. Umpamanya, sekretariat koperasi yang masih menumpang di rumah Pak Amin,

atau kekuranggigihan anggota perempuan menyuarakan kepentingannya. Namun, berkaca kepada pengalaman dan pembelajaran sebelumnya, anggota-anggota koperasi percaya bahwa mereka akan sanggup mengatasi tantangan tersebut. Semuanya bisa diatasi jika pengurus dan anggota memiliki rasa saling percaya. Rasa saling percaya inilah yang menjadi tujuan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan demokratis itu. Seperti yang sering dikatakan Pak Amin, Ketua Koperasi Tani Nelayan Palabusa, "Semua permasalahan yang ada selalu diupayakan untuk diselesaikan melalui pertemuan rutin dengan memberikan pemahaman kepada anggota bahwa maju-mundurnya koperasi ini sangat tergantung pada keaktifan seluruh anggota dan pengurus, karena koperasi ini milik kami semua. Siapa lagi yang akan memperhatikan kalau bukan kami sendiri."



Rumput Laut di jemur dengan cara menggantungnya dengan seutas tali. Cara ini diperoleh dari pengalaman petani dari Filipina. Dengan cara menggantung tingkat kekeringan rumput laut akan lebih merata, sehingga kualitasnya lebih baik